

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pemerintahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rumah aman dapat dilihat dari kriteria teknis dan regulasi karena belum adanya rumah aman sebagai layanan rujukan akhir di Kemen PPPA dan tersusunnya model kolaborasi pemerintahan penanganan dan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak ditawarkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Ansel and Gash (2007) adalah:

1. Kriteria dan prasyarat Rumah Aman : terdiri dari kriteria teknis dan regulasi. Adapun kriteria teknis sebuah Rumah Aman adalah :

a. Unsur SDM : Konselor, Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Advokat, Paralegal, Manager Kasus, Aparat Penegak Hukum, Security Rumah Aman.

b. Unsur Sarpras :

- Spesifik rumah dan barang yang berstandar sesuai dengan keselamatan penghuni dalam hal ini korban.
- Ruang bermain ramah anak.

Adapun kriteria regulasinya adalah :

- a. Kerahasiaan tempat dari Rumah Aman tersebut.
- b. Keamanan .
- c. Suportif.
- d. Memiliki petugas keamanan dengan kemampuan mumpuni.
- e. Terintegrasi dengan aparat penegak hukum.
- f. Memiliki SOP khusus terkait dengan pencegahan kekerasan oleh petugas kepada korban.

SOP Layanan Perlindungan Khusus Anak, disusun berdasarkan 6 (enam) fungsi layanan yang yaitu: SOP Pengaduan Masyarakat; SOP

Penjangkauan Korban; SOP Pengelolaan Kasus; SOP Penampungan Sementara; SOP Mediasi; dan SOP Pendampingan Korban

2. Model Kolaborasi



Proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dalam hal ini Kemen PPPA dengan para *stakeholder* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi.

Kolaborasi dalam hal ini haruslah dijalankan dengan kebersamaan dan adanya rasa percaya antar instansi, lembaga dan masyarakat secara sederhana, sebuah tim hebat tumbuh dengan kepercayaan yang menjadi suatu tantangan dalam mewujudkannya sehingga menghasilkan suatu kinerja yang maksimal.

2) Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi.

Membangun komitmen dalam proses kolaborasi untuk menjalankan aktivitas dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh motivasi yang kuat

dari masing-masing *stake holder* dalam hal ini instansi, lembaga dan masyarakat dalam hal pencapaian tujuan. Motivasi ini perlu dijaga dengan baik, agar kerjasama dapat terus berjalan dengan optimal.

Menjaga motivasi ini merupakan tantangan bagi pemimpin atau setiap instansi, lembaga dan masyarakat dalam menjalankan suatu proses. Seringkali motivasi ini ditentukan oleh kepentingan atau manfaat yang diperoleh dari apa yang dikerjakan.

Tidak salah jika kita melakukan suatu kegiatan berdasarkan keuntungan, namun tentunya tidak semua keuntungan harus diukur dengan ketersediaan anggaran. Motivasi harus selalu diingatkan dan dikuatkan dalam kerjasama, dengan cara menyamakan persepsi visi dan misi, mengingatkan tujuan yang ingin dicapai, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, mengelola konflik produktif.

Salah satu tolok ukur motivasi yang terpelihara dengan baik adalah terwujudnya komitmen. Komitmen untuk berkolaborasi adalah katalisator.

3) Berbagi pengetahuan mengenai persoalan dan misi yang dijumpai dan mengetahui berbagai nilai umum pada kolaborasi

1. Sulit membangun kepercayaan

Sebuah kepercayaan memerlukan waktu supaya terbentuk dan tidak akan terbangun tanpa adanya komunikasi yang transparan dan jelas antar individu dan tidak adanya ego sektoral. Hal tersebut juga menjadi satu dari tantangan saat melaksanakan kolaborasi dalam tim.

2. Komunikasi

Melaksanakan komunikasi antar *stakeholder* dan melaksanakan kolaborasi di tempat bekerja bahkan apabila terdapat orang yang tidak menghendaki komunikasi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kekurangan ruang untuk berkomunikasi secara transparan atau tidak terdapat sarana yang memungkinkan semua orang mengemukakan idenya. Permasalahan ini dapat ditangani dengan rutin memberikan kesempatan untuk diskusi dengan transparan ketika melaksanakan diskusi ataupun rapat.

3. Visi yang tidak jelas

Visi yang tidak jelas saat bekerja ialah tantangan berikutnya saat melaksanakan kerjasama. Jika tidak terdapat visi yang jelas tentang hal yang harus dibuat serta dikerjakan dan tujuan dari suatu pekerjaan, seluruh orang akan mengalami kebingungan saat bekerja. Bahkan juga menyebabkan kehilangan motivasi, produktivitas, serta efisiensi kerja yang diakibatkan oleh tantangan.

4. Tanggung jawab

Ketiadaan tanggung jawab dan perbedaan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu bisa menjadi tantangan kerjasama saat melakukan suatu proses kolaborasi. Tantangan tersebut dapat menjadi kendala komunikasi sebab terdapat kemungkinan seorang individu tidak ingin berbagi informasi penting karena perbedaan tugas atau tanggung jawab.

5. *Intermediate outcomes* melalui peninjauan tentang cara mencapai keberhasilan awal melaksanakan perencanaan strategis serta menemukan berbagai fakta bersama-sama.

6. Produktivitas

Kurangnya produktivitas adalah salah satu tantangan kolaborasi. Penurunan produktivitas dapat disebabkan karena kekurangan umpan balik sehingga sukar melaksanakan komunikasi antar individu.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan sejumlah saran yaitu:

1. KemenPPPA perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan para *stakeholder* dalam penanganan anak dan perempuan korban tindak kekerasan, terutama dalam penyediaan dan manajemen rumah aman, karena masih perlu dilakukan optimalan dalam proses kolaborasi tersebut serta dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam memenuhi kriteria dan syarat rumah aman merujuk pada perspektif korban dan responsif gender.

2. Sebagai dasar dari proses kolaborasi yang akan dilakukan oleh KemenPPPA bersama dengan *stakeholder* lainnya ialah adanya landasan hukum atau payung hukum yang dapat menjamin proses kolaborasi akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa tanggungjawab atas tugas yang telah dituangkan di dalam landasan hukum tersebut.
3. Data primer dari penelitian ini terbatas bersumber dari Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk menyediakan dan mengelola rumah aman untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk lebih baik lagi.
4. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap komitmen para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait Rumah Aman dengan harapan dapat merealisasikan salah satu 5 (lima) arahan Presiden terkait dengan pembangunan pada bidang Perlindungan Anak dan pemberdayaan perempuan yakni meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha yang mendukung kesetaraan gender, meningkatkan peranan ibu serta keluarga dalam dunia pendidikan atau mengasuh anak, menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan, pengembangan layanan SAPA 129 sebagai awal penerima laporan awal, Literasi dan Penyadaran Publik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk pengembangan berbagai media promosi dan publikasi. Mencatat dan melaporkan kasus kekerasan, Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam memberikan layanan dan pendampingan bagi korban (psikolog), Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum yang berperspektif gender, sehingga dalam petugas dapat memberikan pelayanan dengan memahami isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak, serta kebutuhan-kebutuhan spesifik mereka.
5. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti ketersediaan anggaran berupa DAK Fisik yang diberikan oleh Kemen

PPPA kepada daerah dalam merealisasikan Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif gender.



**POLITEKNIK
STIA LAN**
JAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Aaltonen, K., Virpi, T. 2022. *Institutionalization of a Collaborative Governance Model to Deliver Large, Inter-Organizational Projects*. *International Journal of Operations and Production Management*. 42 (8): 1294-1328.
- Agbodzakey. 2011. *Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Countries of South Florida*. *Journal Springer Science Business Media*.
- Agranoff, R., Mac Guire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown Univ Press.
- Allison., Allison. 2004. *Perencanaan Strategi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Alter., Hage. 1993. *Organization Workings*. Jakarta: Kiblat Buku Utama.
- Ammar, M., Hidayatulloh. 2019. *Collaborative Governance in Gender Mainstreaming Policy in Yogyakarta City*. *Jurnal Studi Pemerintahan*. 10 (2): 166-182.
- Ansell, C. 2014. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance*. 13 (1): 1-30.
- Assi, K., Zachary, B., Jocelyn, M. 2019. *Collaboration, Venus and Mars: The Gender Factor in Intersectoral Relations*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 1 (1): 18-31.
- Bailey, L. 1968. *Improving Health in the Community: A Role for Performance Monitoring*. Washington, D.C: National Academy Press.
- Balahdiah, F., Zerah, J., Gelzen, J. 2022. *Violence Against Women and Their Children Incident Report: Data Exploration for VAWC Awareness*. *International Review of Social Sciences Research*. 2 (1): 98-119.
- Bernstein. 1976. *The Restructuring of Social and Political Theory*. London: Methuen & Co Ltd.
- Bingham., O'Leary. 2008. *Legal Framework for Governance and Public Management*. *Big Ideas in Collaborative Public Management*. 247-269.
- Booher, D., Judit, I. 2004. *Network Power in Collaborative Planning*. *Journal of Planning Education and Research*. 21 (1): 221-236.

- Buttler., Coleman. 2005. *Manajemen Strategis, Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Kanisius.
- Bruno, M. 2020. *The Challenge of the Bycycle Street: Applying Collaborative Governance Process While Protecting User Centered Innovations. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*. 7 (1): 1-13.
- Bryson, J., Crosby, B., Stone, M. 2006. *Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration Review*. 75 (1): 647-663.
- Carrington., Butler, J. 2020. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York and London: Routledge.
- Chambers, R. 2003. *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Choi. 2014. *Reframing Organizations: Artistry and Leadership*. New York: Jossey Bass.
- Criado, J., Ariana, G. 2020. *Public Sector, Open Innovation, and Collaborative Governance in Lockdown Times. A Research of Spanish Cases During the Covid-19 Crisis. Transforming Government: People, Process and Policy*. 15 (4): 612-626.
- Daalen, K., Sarah, S., Fiona, D., Laura, S. 2022. *Extreme Events and Gender Based Violence: A Mixed Methods Systematic Review. Review*. 6 (1): 504-523.
- Dye. 2017. *Understanding Public Policy* revel Access Code. New York: Pearson.
- Dapilah, F., Jonas, O., Karen, L., Sarah, A. 2021. *He Who Pays the Piper Calls the Tune: Understanding Collaborative Governance and Climate Change Adaptation in Northern Ghana. Climate Risk Management*. 32 (1): 1-15.
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 (1): 1-29.
- Farazmand, A. 2004. *Administrative Reform in Developing Nation*. London: Praeger.
- Folke, C., Hahm, T., Olsson, P., Norberg, J. 2005. *Adaptive Governance of Social Ecological Systems. Annual Review of Environment and Resources*. 30 (1): 441-473.

- Ferrari, G., Sergio., Esnat, C., Andrew, G. 2022. *Prevention of Violence Against Women and Girls: A Cost-Effectiveness Study Across 6 Low and Middle-Income Countries*. *Plos Medicine*. 48 (1): 1-31.
- Fraser, D., Cooper, M. 2020. *Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Futrell, R. 2003. *Technical Adversarialism and Participatory Collaborative in the U.S Chemical Weapons Disposal Program*. *Science, Technology and Human Values*. 28 (1): 451-482.
- Gastil, J., Levine, P. 2005. *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*. San Francisco: Jossey Bass.
- Godin, M. 2010. *Acute Renal Failure and Fanconi Syndrome Due to Deferasirox*. *Nephrol Dial Transplant*. 25 (1): 2376-2378.
- Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A. 2019. Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modelling*. 53 (9): 1689-1699.
- Gray, J. 1989. *Men are from Mars, Women are from Venus*. New York: Harper Collins.
- Hafel, M., Julfi, J., Mohbir, U., Anfas. 2021. *Collaborative Governance Between Stakeholders in Local Resource Management in North Maluku*. *Journal of Hunan University*. 48 (4): 83-87.
- Hadi, S. 2021. *Metode Research III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid, H. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Hardiyanti, M., Ani, P., Dyah W. 2018. *Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang*. *Diponegoro Law Journal*. 7 (2): 1689-1699.
- Hartati, M. 2013. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur. *Ejournal Fisip Unmul*. 1 (13): 1094-1106.
- Henna, S., Maria, A. 2022. *Collaborative Governance as a Means of Navigating the Uncertainties of Sustainability Transformations: The Case of Finish Food Packaging*. *Ecological Economics*. 197 (1): 1-11.

- Heikkila, T., Gerlak, K. 2005. *The Formation of Large-Scale Collaborative Resource Management Institutions: Clarifying the Roles of Stakeholders, Sciences and Institutions*. *Policy Studies Journal*. 33 (1): 583-612.
- Hobfoll, S. 2001. *The Influence of Culture, Community and the Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory*. *Applied Psychology*. 50 (3): 337-421.
- Huxam, C., Vangen, S. 2000. *Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (not Quite) Joined-up World*. *Academy of Management Journal*. 43 (1): 1159-1175.
- Innes, J., Booher, D. 2010. *Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue*. In *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jessop, B. 1990. *Liberalism, Neoliberalism and Urban Governance: A State Theoretical Concept*, Blackwell Publishers. Oxford.
- Leach, W., Pelkey, N., Sabatier, P. 2002. *Stakeholder Partnerships as Collaborative Policy Making: Evaluation Criteria Applied to Watershed Management in California and Washington*. *Journal of Policy Analysis and Management*. 21 (1): 645-670.
- Li, B., Jiwei, Q., Juan, X., Yiran, L. 2022. *Collaborative Governance in Emergencies: Community Food Supply in Covid-19 in Wuhan, China*. *Urban Governance*. 1 (1): 1-9.
- Lyn, L., Heinrich, J., Hill, C. 2011. *Improving Governance: A New Logic for Empirical Research*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Milward, H., Provan, K. 2000. *Do Networks Really Work: A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks* *Public Administration Review*. 61 (4). 18-31.
- Malekpour, S., Sylvia, T., Chris, C. 2021. *Designing Collaborative Governance for Nature-Based Solutions*. *Urban Forestry and Urban Greening*. 62 (1): 1-13.
- Milles, M., Huberman, M., Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook) Edition 3*. United State of America: SAGE Publications, Inc.
- Nuryantiningih, P., Purwanti, S., Sarah, C. 2021. *Konsep Penyediaan Sarana Perumahan Skala Kecil Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perencanaan Neighborhood Unit dan Walkability*. *Jurnal Tata Loka*. 24 (1): 45-61.

- O'Leary., Vij, N. 2012. *Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where are We Going? The American Review of Public Administration*. 42 (5): 507-522.
- Osborne, D., Gabler, T. 1992. *Mewirusahaakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo.
- Palermo., Peterman. 2011. *Decreased Quality of Life Associated with Obesity in School-Aged Children*. *Arch Pediatr Adolesc*. 157 (1): 206-211.
- Pasolong, H. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi KPPPA 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2002 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peterman, A. 2020. *Pandemics and Violence Against Women and Children*.
- Plotnikof, M. 2015. *Negotiating Collaborative Governance Designs: A Discursive Approach*. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*. 20 (3): 1-22.
- Provan, K., Kenis, B. 2008. *Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks*. *Public Administration Review*. 61 (1): 414-423.
- Purwati, Y., Muslikhah, A. 2020. Gangguan Menstruasi Akibat Aktivitas Fisik dan Kecemasan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiah*. 16 (2): 1-10.
- Purwanti, A., Marzelina, Z. 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*. 47 (2): 138-152.
- Quade, E. 1989. *Analysis for Public Decisions 3rd Edition*. North Holland.
- Raharjo, Mudjia. 2008. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Animal Genetic*. 39 (5): 561.

- Raja, D., Piki, D. 2021. *Administrasi Publik*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Rhodes, R. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexity and Accountability*. Open University Press.
- Robert, E., Weber, E. 2000. *Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements*. *American Review of Public Administration*. 40 (5): 546-567.
- Rugebregt, R. 2022. *Violence Against Women and Its Strategic Role in Covid-19 Control*. *Pattimura Law Journal*. 6 (2): 38-48.
- Ruijter, E. 2021. *Designing and Implementing Data Collaborative: A Governance Perspective*. *Government Information Quarterly*. 38 (1): 1-12.
- Sari, D., Robert, T., Martoo, S., Marisi, B., Heri, P. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ikeas Publishing.
- Silap, C., Ventje, K., Neni, K. 2019. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 3 (3): 1-10.
- Silvia, I. 2019. *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Governance dan Kebijakan Perusahaan)*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stoker, G. 1998. *Governance as Theory: Five Positions*. *International Social Science Journal*. 50 (1): 17-28.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanti, A., Hidayah, U., Sari, P. 2018. Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai HIV/AIDS Setelah Mengikuti Program Hebat di SMP Negeri Kota Bandung. *JSK*. 3 (3): 1-12.
- Tazkia, A., Listianingsih, C. 2022. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*. 18 (1): 25-44.
- Temmerman, L., Carina, V., Pieter, B. 2020. *Collaborative Governance Platform for Social Innovation in Brussels*. *Social Enterprise Journal*. 17 (2): 165-182.

- Thomson, A., Perry, J. 2006. *Collaborative Processes: Insiden the Black Box. Public Administration Review*. 66 (1): 20-32.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Program Magister Terapan, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara*. Jakarta: Politeknik STIA LAN
- Ulla, I., Dong-Young, K. 2020. *A Model of Collaborative Governance for Community-Based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries. Perspectives in Ecology and Conservation*. 18 (1): 145-160.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Usman, H., Setiyadi, P. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utami, P. 2016. Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*. 7 (1): 55-79.
- Wahab, A., Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuningsih, E., Nathasia, M., Rining, N. 2020. Model Peningkatan Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal of Sosial Ekonomi dan Politik*. 1 (1): 1-15.
- Wanqing, Z. 2020. *Domestic Violence Cases Surge During Covid-19 Epidemic*.
- Westmarland, N. 2015. *Pandemics and Violence Againsts Women and Children*. New York: Routledge.
- Wibawa, S., Darulfa, A. 2020. *Collaborative Governance in Achieving Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. Jiapi: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*. 1 (1): 35-42.

Widjaya, L. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yasmin, A. 2016. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC.

Zheng, L. 2022. *Collaborative Governance of Haze Pollution Between Local Governments*. *Alexandria Engineering Journal*. 1 (1): 1-11.



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA